

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS SEJAHTERA

Nela Roza, Sujianto dan Harapan Tua R.F.S

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Implementation of the Prosperous Rice Program. The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of a prosperous rice program in Talang Gedabu Village, Rakit Kulim District, Indragiri Hulu Regency. This study uses a qualitative descriptive research method. The sources of data in this study were the Village Literature Implementation Team, Inner Board, Hamlet Head, and several Beneficiary Families (KPM) in Talang Gedabu Village. And data analysis is done through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the implementation of the prosperous rice program are inaccurate, in the sense that the free rice assistance provided by the government is still inaccurate and not in accordance with those who really have the right to receive it. This can be said because of the five indicators as the success of the prosperous rice program based on TNP2K, only one indicator is right.

Keywords: implementation, program, poverty, prosperous rice, effectiveness

Abstrak: Implementasi Program Beras Sejahtera. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi program beras sejahtera di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Tim Pelaksana Rastra Tingkat Desa, Batin, Kepala Dusun, dan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Desa Talang Gedabu. Dan analisis data dilakukan dengan melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil dari program implementasi beras sejahtera adalah kurang tepat, dalam artian bantuan beras gratis yang diberikan oleh pemerintah masih kurang tepat dan kurang sesuai dengan orang yang benar-benar berhak menerimanya. Hal ini dapat dikatakan karena dari lima indikator sebagai keberhasilan program beras sejahtera tersebut berdasarkan TNP2K, hanya satu indikator saja yang tepat.

Kata kunci: implementasi, program, kemiskinan, beras sejahtera, efektivitas

PENDAHULUAN

Program beras sejahtera (Rastra), sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yang termasuk program bantuan sosial berbasis kekeluargaan yang dulu sering disebut beras miskin (Raskin) sejak tahun 1998 dan berganti nama menjadi rastra. Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan.

Program rastra tergolong program nasional. Program ini melibatkan berbagai pihak baik vertikal maupun horizontal. Secara horizontal semua sektor terkait memiliki tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam pelaksanaan program rastra. Secara vertikal program rastra bukan program pemerintah

pusat semata, akan tetapi juga pemerintah daerah memiliki tanggungjawab secara proporsional. Dalam hal ini pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan nasional, sedangkan pelaksanaan dan penyalurannya sangat tergantung pada peran pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan subsidi pembelian beras yang dilaksanakan oleh perum Bulog untuk disalurkan sampai titik distribusi (TD). Untuk selanjutnya pemerintah daerah menyampaikan beras tersebut kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan 5 (lima) tepat (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat administrasi).

Efektifitas program distribusi rastra dapat ditingkatkan melalui koordinasi antar

instansi/lembaga dari tingkat pusat maupun daerah. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran program rastra adalah sebagai berikut:

1. Tujuan program rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
2. Sasaran program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 10 kg/KPM/ bulan atau sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Berdasarkan pra survey yang penulis lakukan pada Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim, terdapat beberapa gejala-gejala yang berkaitan dengan proses distribusi rastra.

1. Tidak tepatnya sasaran program distribusi rastra untuk masyarakat miskin, hal ini dikarenakan beras sejahtera (rastra) yang terdapat di Desa Talang Gedabu tidak dapat dirasakan seluruh keluarga miskin. (Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim)
2. Kurang jelasnya prosedur tentang masyarakat yang berhak menerima rastra sehingga banyak masyarakat yang ikut serta dalam penerimaan rastra yang tidak tergolong pada kriteria masyarakat miskin. Pelaksanaan subsidi rastra tidak sesuai dengan tujuan yang terdapat pada pedoman umum rastra. Penyimpangan yang sering terjadi yaitu tidak tepatnya waktu pensubsidian rastra sehingga menimbulkan hambatan dalam proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin.
3. Kejanggalan selanjutnya yang diamati oleh peneliti adalah kualitas beras yang diberikan ma-

syarakat yang menerimanya masih dalam tanda tanya, karena kebanyakan beras tersebut kurang bagus bila dibandingkan dengan beras kampung masyarakat yang mereka makan setiap hari.

Berdasarkan gejala (fenomena) diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana implementasi program beras sejahtera di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan juga sebagai pelaksanaan atau penerapan. Brown dan wildavsky (dalam Nusrin dan Usman, 2004) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Leo Agustino dalam Dasar-dasar kebijakan publik (2008) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksanaan kebijakan merupakan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Daniel Mazmania dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983) mendefinisikan kebijakan sebagai

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan efektif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi”.

Menurut Nugroho (2003), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003) mengemuka-

kan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

Menurut teori Merilee S Grindle dalam buku Analisis Kebijakan Publik oleh Subarsono (2005) adalah Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup :

- a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
- b. jenis manfaat yang diterima oleh *target group*
- c. sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- d. apakah letak sebuah program sudah tepat
- e. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci
- f. apakah sebuah program didukung sumber daya yang memadai

Sedangkan variabel lingkungan implementasi kebijakan mencakup:

- a. seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
- c. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

METODE

Penelitian ini secara umum merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pembangunan dan Tim Pelaksana Distribusi Rastra di tingkat Desa. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Di dalam analisis data menggunakan metode

deskriptif, yakni informasi hasil wawancara digabungkan dengan data yang didapat dan digunakan dengan penelitian. Kemudian penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Isi Kebijakan

Isi Kebijakan adalah proses penerapan isi kebijakan yang disusun dalam upaya merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Pemahaman terhadap isi kebijakan menjadi titik tolak bagi implementor untuk bisa mencapai standar implementasi. Karena apabila implementor tidak memahami isi kebijakan yang akan dilaksanakan, maka sangat tidak mungkin isi kebijakan yang sudah disusun dan ditetapkan dapat direalisasikan. Oleh karenanya dalam upaya memberikan pemahaman yang jelas akan isi kebijakan, maka dibutuhkan para implementor yang berkualitas pula. Sebab dengan tingkat kualitas yang tinggi dari seorang implementor, maka isi kebijakan akan lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Untuk itu dalam upaya mengimplementasikan kebijakan dibutuhkan kesiapan segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pelaksana kebijakan.

Dalam penelitian pelaksanaan Program Beras Sejahtera di Desa Talang Gedabu, isi kebijakan dapat dilihat dari :

a. Pemahaman kepentingan KPM akan Rastra

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendataan program Rastra yang dilakukan terkesan dipisahkan serta keterbatasan waktu yang dilakukan dalam melakukan pendataan yang memengaruhi tahapan pelaksanaan program Rastra.

Selama ini, kriteria keluarga prasejahtera 2 (dua) dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) banyak digunakan dalam penentuan sasaran penerima bantuan, namun untuk menentukan sasaran penerima program Rastra di Indragiri Hulu digunakan kritesia Keluarga Penerima Manfaat dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditentukan dengan menggunakan meto-

de pendekatan kemampuan (*proxy-means testing*) dan didasarkan pada kerangka kerja kontekstual, yang berarti variabel kemiskinan untuk tiap kabupaten/kota tidak selalu sama.

b. Manfaat Rastra yang Diterima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang menerima Rastra adalah cukup dari pada kepuasan aparat atau tokoh Desa/Kelurahan yang cenderung lebih mengatakan puas. Meskipun demikian penerima ataupun aparat/tokoh ditingkat Desa/Kelurahan menilai bahwa sosialisasi merupakan aspek yang paling tidak memuaskan.

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) cukup senang dengan adanya beras Rastra ini, dan cukup mendapat manfaat serta terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya berupa beras secara gratis, walaupun sebagian KPM masih merasakan kurang dengan adanya bantuan raskin tersebut tidak bertahan lama dikarenakan jumlah anggota keluarga yang cukup banyak.

c. Perubahan Kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Setelah Mendapatkan Rastra

Suatu program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran rekatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberi bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat.

Dari analisis korelasi ketepatan pembagian manfaat tersebut diatas, tingkat ketepatan sasaran Program Rastra dapat dievaluasi, baik ditingkat kewilayahan maupun ditingkat rumah tangga. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa setiap ukuran yang digunakan dalam mengevaluasi ketepatan sasaran akan memberikan evaluasi yang berbeda. Keragaman pengukuran ketepatan sasaran dapat dijelaskan jika diketahui dengan tepat konsep dan metode pengukuran kemiskinan pembanding yang digunakan serta tingkat analisisnya.

d. Ketepatan Sasaran Program Rastra

Keputusan penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima Rastra diputuskan sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS), berupa daftar Keluarga Penerima manfaat (KPM), tetapi didalam daftar tersebut masih ada keluarga yang mampu mendapatkan Rastra dan sebaliknya masih ada warga miskin atau layak yang mendapatkan Rastra tidak mendapatkannya. Sehingga terjadi keresahan ditengah-tengah masyarakat, untuk masalah ini penghulu adat (Batin) tidak ada mengajukan protes atau pun keluhan dari warga terhadap program Rastra ini kepada desa, dikarenakan memang daftar orang yang menerima Rastra tersebut sudah ditentukan langsung dari Kabupaten/Kota juga tidak ada secara langsung dan terbuka warga menyampaikan keluhannya kepada pemerintahan desa. Namun batin itu sendiri secara sadar dengan melihat kondisi warganya yang serba kekurangan menenangkan hati warga yang tidak mendapatkan Beras Sejahtera kepada warganya.

e. Kejelasan Implementor tentang Program Rastra

Permasalahan yang muncul menyangkut pentargetan dan penyaluran program Rastra terkait dengan lemahnya sosialisasi program. Hasil wawancara dengan Bapak Pida Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) dan Bapak Andi (Staff Desa) pada Desa Talang Gedabu, menyatakan bahwa :

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa implementor cukup paham tugasnya masing-masing, sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan, akan tetapi belum tepat sasaran karena warga yang membutuhkan beras belum seluruhnya terakomodir karena jatah jumlah penerima Rastra tersebut sudah ditentukan kuotanya sehingga tidak semua tergolong miskin mendapat Rastra.

f. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sebagai Implementor

Keberhasilan sebuah program harus didukung dengan Sumber Daya yang mema-

dai dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga sumber daya manusia dalam melaksanakan program di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dikatakan belum berpendidikan namun cukup berpengalaman akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan perlu adanya penyuluhan dan pelatihan agar kualitasnya mencukupi.

Kesimpulan sementara dari isi kebijakan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yaitu :

1. Pemahaman kepentingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Dalam menentukan sasaran penerima Rastra diterima adanya kesalahan (*mistargeting*) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, sering tidak tepat karena memprioritaskan kelompok-kelompok tertentu (*subjektifitas*), pendataan yang tidak melibatkan pihak kelurahan dan RT sehingga kebijakan program pendataan Rastra dinyatakan oleh warga.

2. Manfaat Rastra yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Program Rastra ini dinilai cukup bermanfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat, namun sebagian KPM masih merasakan kurang dengan adanya bantuan raskin tersebut tidak bertahan lama dikarenakan jumlah anggota keluarga yang cukup banyak.

3. Perubahan Kondisi keluarga Penerima Manfaat (KPM) setelah Mendapatkan Rastra

Sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengatakan bahwa program Rastra ini sangat bermanfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan beras dalam tiga sampai empat bulan sekali.

4. Ketepatan Sasaran Program Rastra
Ketidaktepatan sasaran didukung dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tidak valid, karena pendataannya tidak berkoordinasi

dengan pihak Kelurahan dan Ketua RT serta Tokoh masyarakat setempat (bersifat tertutup)

5. Kejelasan Implementor Tentang Program Rastra

Implementor cukup paham dengan tugasnya masing-masing, sosialisasi juga berjalan sesuai dengan yang diinginkan, akan tetapi belum tepat sasaran karena warga yang tergolong mampu mendapat Rastra.

6. Kualitas dan Kuantitas SDM Sebagai Implementor

Bulog sebagai pelaksana teknis pencairan beras tidak hanya terpaut dengan unsur kapasitas teknis saja, selain itu unsur tanggungjawab dan komitmen yang ada di tingkat Kelurahan dan RT tidak kalah pentingnya artinya.

Lingkungan Kebijakan Program

Program Beras Sejahtera atau yang sering disebut dengan Ratra ini terkesan sebagai program dadakan yang hanya mengejar target waktu untuk meredam gejolak sosial akibat semakin naiknya kebutuhan pokok dan harga BBM.

Namun yang membedakan program yang berbasis partisipasi masyarakat ini dengan program-program yang bersifat *top-down* adalah dengan melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan perumusan kebijakan mengenai pelayanan publik dan mekanisme pengaduan dari masyarakat.

Berkaitan dengan program Rastra, pemerintah perlu segera mengoptimalkan infrastruktur pengaduan masyarakat di setiap tingkat pemerintahan dan daerah untuk membangun dan menyelesaikan berbagai pengaduan masyarakat menyangkut program Beras Sejahtera. Tentu saja, untuk hal ini pemerintah perlu melatih petugas pengaduan yang proaktif dan sensitif terhadap keluhan dari warga.

Adanya mekanisme pengaduan yang jelas dapat memberi umpan balik bagi pelaksana program pada tahap-tahap selanjut-

nya, selain menghindari munculnya berbagai aksi kekerasan dan gejolak sosial yang bisa menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat, pengembangan mekanisme pengaduan ini juga sepatutnya membuka kesempatan bagi munculnya inisiatif lokal dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Program Rastra

Berdasarkan data-data dan informasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa kekuasaan, kepentingan cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan masyarakat dan strategi implementasi yang dilakukan di tiap-tiap Rukun Tetangga dapat mencapai keberhasilan dengan baik serta berjalan dengan lancar.

b. Karakteristik Rezim yang Berkuasa

Karakteristik dari rezim yang berkuasa akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Apabila rezim yang berkuasa mengedepankan kepentingan rakyat, maka kesejahteraan rakyat akan segera terwujud, karena rezim yang seperti ini akan mengedepankan kepentingan rakyat. Namun yang akan terjadi sebaliknya apabila rezim yang berkuasa lebih mengutamakan kepentingan kelompok ataupun pribadi. Dalam keadaan ini masyarakat akan dipojokkan dan tidak menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan, sehingga masyarakat menjadi korban dari rezim kepemimpinan yang berkuasa.

c. Tingkat Kepuasan dan Responsivitas Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah, karena hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan program dari pemerintah. Pada dasarnya program yang dilaksanakan adalah demi kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat disini diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah. Masyarakat harus mampu menjadi partner pemerintah sehingga dapat menilai kerja pemerintah. Ini akan dapat mem-

permudah untuk mengadakan koreksi terhadap kesalahan dan kekeliruan yang terjadi sehingga akan lebih mudah dan lebih cepat dibenahi, serta program dapat berjalan sebagaimana mestinya.

PEMBAHASAN

Penelitian ini tentang pelaksanaan implementasi program beras sejahtera di Desa Talang Gedabu. Pada teori ini kita akan melihat pengertian Implementasi adalah suatu proses yang dinamis dimana pelaksanaan kebijakan merupakan suatu aktifitas atau kegiatan (Leo Agustino: 2008). Dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Kebijakan Program Rastra di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yaitu :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi program Rastra cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan dari masyarakat untuk mewujudkan kehendak dan harapan sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kondisinya.
2. Karakteristik Rezim yang Berkuasa, kebijakan strategi pendistribusian Rastra berdasarkan hasil verifikasi dan pendataan ulang oleh tim TKPK tidak menuai protes dari warga karena hasil dari keputusan rapat koordinasi Rastra.
3. Tingkat Kepatuhan dan Responsive Kelompok Sasaran, respon warga cukup baik dan antusias serta mematuhi keputusan rapat koordinasi Rastra dalam pembagian Rastra berdasarkan verifikasi ulang, meskipun ada beberapa warga yang belum patuh dengan sistem pengambilan Beras Sejahtera di Desa.

Pemerintah mengakui bahwa ada enam titik kritis atau kelemahan yang harus dibenahi dalam pengucuran bantuan Rastra di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, keenam titik krisis tersebut meliputi :

1. Proses pendataan oleh BPS pada Keluarga Penerima Manfaat
2. Proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat
3. Proses pembagian Beras Sejahtera
4. Proses Penyaluran bantuan
5. Proses Sosialisasi
6. Proses penanganan Pengaduan

Sedangkan hasil wawancara dengan informan dan informasi dilapangan, kendala yang dihadapi program Rastra di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu :

1. Penyimpangan kualitas beras yang kadang bagus dan kadang jelek serta ada yang busuk bahkan ada yang bercampur dengan kaca
2. Pembagian penerima Rastra yang mengandung unsur subyektif sehingga tidak tepat sasaran
3. Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari BPS tidak valid dan pendataannya yang tertutup dan tidak melibatkan pihak Desa dan RT sehingga ada warga miskin yang layak menerima Beras Sejahtera tersebut tidak mendapatkannya begitu juga sebaliknya sehingga menimbulkan ancaman, dan kecemburuan sosial ditengah masyarakat dan dapat menimbulkan konflik
4. Kebijakan dari TKPK yang memberikan kuota penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada tiap-tiap Desa sehingga tidak semua warga miskin terakomodir dalam verifikasi yang dilakukan oleh TKPK
5. Pengambilan Rastra yang selalu tertunda dan tidak tepat waktu oleh KPM.

Dalam membahas program Rastra penulis cenderung memilih teori dari Merilee S Grindle (1980) karena teori tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan dari kebutuhan program Rastra yang lebih membahas masalah-masalah managerial. Berdasarkan buku panduan umum tentang Rastra keber-

hasilan pelaksanaan program Rastra di tunjukkan dengan 5 (Lima) indikator meliputi:

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat Rastra hanya diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada dari data BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKPK memberikankuota terbatas kepada KPM dalam keputusan rapat koordinasi sehingga pembagian Rastra berpatokan pada hasil rapat tersebut setelah diverifikasi.
2. Tepat Jumlah Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan 10kg per bulannya. Dari hasil penelitian jumlah yang diterima warga miskin dapat dikatakan tepat jumlah
3. Tepat Waktu Sesuai dengan rencana dari jadwal distribusi, namun dari hasil penelitian ada jadwal pembagian Rastra yang diundur karena pendistribusian yang menunggu dari Bulog
4. Tepat Administrasi Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu, hasil penelitian ada beberapa warga yang mengambil Rastanya tidak sesuai sistem yang ditentukan.
5. Tepat Kualitas Kondisi beras baik sesuai dengan standar beras pemerintah, namun hasil penelitian ada terdapat beras yang berkualitas buruk, hitam, bahkan pernah bercampur dengan kaca tetapi dengan jumlah sedikit, hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program Rastra yang ditunjukkan dengan ke lima indikator tersebut cukup bermanfaat.

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa hasil penelitian implementasi program beras sejahtera di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, dalam

pelaksanaannya masih kurang tepat dan belum terlaksana dengan baik. Hal ini berdasarkan analisa peneliti dan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan key informan. Yang mana dari 5 Indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program beras sejahtera yang telah ditentukan oleh TNP2K (tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan), hanya satu indikator yang dikatakan tepat dan sesuai dengan petunjuk penyaluran beras sejahtera tersebut. Yaitu indikator tepat kualitas, yang mana beras yang diterima masyarakat tersebut dalam keadaan baik dan layak untuk dikonsumsi. Sementara empat indikator lainnya yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Grindle, 1980, *Policy Content and Context In Implementation* Princeton, Universitas Press, New Jersey.
- Mazmania, Daniel Sabatier, Paul, 1983, *Implementation and Public Policy*, Scott, Foresman
- Nugroho Rian, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Alex Media Komputindo Gramedia.
- Nusrin dan Usman. 2004. *Managemen Sumber Daya Manusia*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sujianto, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.